TODUNG MULYA LUBIS

ANTOLOGI TULISAN TOKOH DAN SAHABAT

EDITOR:
AWALUDIN MARWAN

Thafamedia

TODUNG MULYA LUBIS

ANTOLOGI TULISAN TOKOH DAN SAHABAT

Franz Magnis-Suseno | Azyumardi Azra | **Ahmad Syafii Maarif** | Komaruddin Hidayat | **Nasaruddin Umar** | Jusuf Wanandi | **Henny Supolo Sitepu** | Luhut M.P Pangaribuan | **Lelyana Santosa** | Mas Achmad Santosa | **Frans Hendra Winarta** | Tony Wenas | **Ismid Hadad** | Nursyahbani Katjasungkana | **Makarim Wibisono** | Asvi Warman Adam | **Robertus Robet** | HS Dillon | **Al Araf** | Jimly Asshiddiqie | **Denny Indrayana** | Harifin A. Tumpa | **Ikrar Nusa Bhakti** | Hamid Awaludin | **Ningrum Natasya Sirait** | Jasmine Hadisuwita, SH | **Wahyu Heriyadi** | Atmakusumah | **Arief Budiman** | Smita Notosusanto | **Natalia Soebagjo** | Erry Riyana Hardjapamekas

Editor:
Awaludin Marwan

Thalamedia

Todung Mulya Lubis

Antologi Tulisan Tokoh dan Sahabat

Penulis:

Franz Magnis-Suseno, Azyumardi Azra, Ahmad Syafii Maarif, Komaruddin Hidayat, Nasaruddin Umar, Jusuf Wanandi, Henny Supolo Sitepu, Luhut M.P. Pangaribuan, Lelyana Santosa, Mas Achmad Santosa, Fr. ns Hendra Winarta, Tony Wenas, Ismid Hadad, Nursyahbani Katjasungkana, Makarim Wibisono, Asvi Warman Adam, Robertus Robet, HS Dillon, Al Araf, Jimly Asshiddiqie, Denny Indrayana, Harifin A. Tumpa, Ikrar Nusa Bhakti, Hamid Awaludin, Ningrum Natasya Sirait, Jasmine Hadisuwita, SH, Wahyu Heriyadi, Atmakusumah, Arief Budiman, Smita Notosusanto, Natalia Soebagjo, Erry Riyana Hardjapamekas

Editor:

Awaludin Marwan

Perwajahan dan Penata letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Maret 2021
ISBN: 978-602-5589-47-8

14x21 cm
xii + 341 hlm.

Diterbitkan Oleh
Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762
Phone : 082138313202, 081227754 74
E- mail : *thafamedia@yahoo.co.id*

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Daftar Isi

Pengantar v
Daftar Isi ix

Keindonesiaan

Todung Mulya Lubis dan Demokrasi Indonesia 2
Franz Magnis-Suseno

Bang Mulya dan Saya; Kenangan dan Tribute 8
Azyumardi Azra

Todung Mulya Lubis: Homo Sapiens Yang Multi Talenta 15
Ahmad Syafi Maarif

Ketuhanan dan Kemanusiaan 23
Komaruddin Hidayat

Pendekar Hukum yang Multi Talenta 31
Nasaruddin Umar

Strengthening Multilateralism for a Better Future 34
Jusuf Wanandi

Dulu dan Sekarang 40
Henny Supolo Sitepu

Advokat Profesional

Advokat Indonesia: Menuju Profesi Bukan Saja Benar Tapi Etis 46
Luhut M.P Pangaribuan

Bang Mulya: Mentor, Mitra dan Sahabat 74
Lelyana Santosa

Todung Mulya Lubis: Advokat Berkelas 78
Mas Achmad Santosa

70 tahun Todung Mulya Lubis 85
Frans Hendra Winarta

Todung Mulya Lubis di Mata Manajemen PT Freeport Indonesia 93
Tony Wenas

Generasi Advokat yang Nyaris Hilang 96
Ismid Hadad

Aktivis Hak Asasi Manusia

Todung Mulya Lubis: Pembela Ham Di Titik Nol 110
Nursyahbani Katjasungkana

Todung Mulya Lubis Pendorong Penghormatan HAM 130
Makarim Wibisono

International People Tribunal 1965 di Den Haag: Tiga Tokoh Dari Tiga Negara 140
Asvi Warman Adam

Mencari Hari Ulang Tahun Hak Sipil Indonesia 156
Robertus Robet

Masyarakat Sebagai Penyeimbang: Obsessi Seorang Cendekia 159
HS Dillon

Bang Mulya dan Hak Asasi Manusia 164
Al Araf

Pemikiran Hukum dan Negara Hukum

70 Tahun Todung Mulya Lubis 176
Jimly Asshiddiqie

70 Tahun Todung Mulya Lubis: Memoar Legenda Hidup Pendekar Hukum 183
Denny Indrayana

Peninjauan Kembali yang Diajukan Dua Kali: Terobosan Hukum ataukah Kebablasan Hukum Acara? 192
Harifin A. Tumpa

Todung Mulya Lubis: Aktivis HAM, Pengacara, Dosen dan Duta Besar yang Keren 213
Ikrar Nusa Bhakti

Di Kesenyapan Pun, Ia Tetap Asyik Berpekik 228
Hamid Awaludin

Dua Dasawarsa Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Akan Dibawa Kemana? 240
Ningrum Natasya Sirait

Sekapur sirih 261
Jasmine Hadisuwita, SH

Puisi dan Isyarat Hukum 267
Wahyu Heriyadi

Tentang Demokrasi

Kiprah Todung Mulya Lubis: dari Hukum yang Adil sampai ke Kebebasan Pers 282
Atmakusumah

Guru Hukum dan Demokrasi 292
Arief Budiman

Bang Mulya: Menyemai Benih Demokrasi 301
Smita Notosusanto

Pemberantasan Korupsi

Bang Mulya dan KPK 314
Natalia Soebagjo

Mulya, Calon Tetap dan Tetap Calon 330
Erry Riyana Hardjapamekas

Mencari Hari Ulang Tahun Hak Sipil Indonesia

Robertus Robet

Indonesia harus memperingati sebuah hari khusus yang dimaksudkan untuk menghormati, mengenang sekaligus menegaskan ulang komitmen seluruh bangsa akan pentingnya hak hak sipil. Indonesia memang mengakui keberadaan hari hak asasi manusia internasional, namun peringatan hari hak asasi 10 Desember diperingati lebih sebagai apresiasi terhadap hak asasi sebagai gagasan universal. Di luar hari HAM internasional 10 Desember, kita memerlukan sebuah hari peringatan hak-hak sipil yang kita pilih berdasarkan sejarah dan pengalaman perjuangan anak bangsa, warga negara Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan semua warga dari pelagai bentuk penindasan, menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa diskriminasi, melahirkan gagasan-gagasan kemanusiaan yang mengubah dan melintasi jamannya.

Peringatan hak sipil ini kita perlukan dalam tujuan: pertama memperkuat komitmen dan pengakuan negera akan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia. Kedua, memperkuat budaya hamanistik di Kalanga masyarakat. Ketiga, menghapus budaya kekerasan dan penindasan yang masih terus melekat dalam kehidupan sosial, politik dan budaya kita. Keempat, mencegah keberulangan sejarah kekerasan. Kelima, memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berPancasila.

Ada beberapa alternative hari yang bisa dipilih sebagai Hari Hak SIPIL INDONESIA. Pertama, tanggal 14 Juli. Mengapa tanggal 14 Juli dapat diperingati sebagai Hari Hak Sipil di Indonesia? Pertama, karena pada tanggal 14 Juli 1945, dalam sidang Pleno BPUPK yang membahas rancangan UUD, tampil dua orang penting dalam sejarah pendirian republic kita yakni Maria Ulfah dan Mohammad Hatta. Maria Ulfa adalah orang pertama yang mempertanyakan mengapa hak asasi manusia sama sekali tidak dimasukkan dalam rancangan UUD pada masa itu. Akibat pertanyaan Maria Ulfah itu, debat mengenai hak asasi akhirnya muncul. Soepomo dan Soekarno menolak gagasan hak asasi dengan pelbagai alasan yang berbeda, namun Hatta secara gigih menekankan pentingnya hak-hak yang melindungi warga negara diatur di dalam konstitusi. Akhirnya, meski tidak banyak, pasal-pasal mengenai hak terutama hak berserikat dan berkumpul, dan hak menyatakan pendapat berhasil dimasukkan ke dalam konstitusi pertama Indonesia.

Perdebatan yang diwarisi gagasan Soepomo, Soekarno dan Hatta, ini berlangsung hingga sekarang dalam pelabagai dinamika hukum dan politik. Sejarah memperlihatkan bahwa pada akhirnya, secara normatif sikap dan pendirian Hatta akhirnya yang menang dalam sejarah. Meski kadar hak asasinya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan UUDS 1950, UUD 1945 Indonesia kini, setelah beberapa kali amandemen, telah cukup memiliki pasal-pasal yang memberikan jaminan prinsipiil hak-hak asasi manusia di dalamnya. Di dalam politik, pikiran untuk mempertahankan paham kekeluargaan dan negara quasi-totalitarian selalu muncul turun-naik dalam sejarah, namun aspirasi yang kuat akan demokrasi dan hak-hak warga negara selalu muncul dan menguat.

Kemungkinan kedua untuk dijadikan HARI PERINGATAN HAK_HAK SIPIL di INDONESIA adalah tanggal 21 Mei. Mengapa tanggal 21 Mei? Tanggal 21 MEI 1998 adalah hari mundurnya Presiden Suharto yang memimpin Indonesia sebagai otokrat. Bukan kemunduran Suharto yang terpentig di sini, melainkan rangkaian peristiwa yang melatarbelakngi tanggal 21 Mei itulah yang penting. Menjelang tanggal 21 Mei 1998, bangsa dan masyarakat Indonesia bangkit dalam kesadaran bersama untuk perubahan: memperbaharui sys-

tem politik ke arah yang lebih demokratis, memperluas kebebasan politik, menciptakan institusi-institusi negara yang lebih bisa menjamin keadilan yang bebas dari diskriminasi. Dalam momen Mei 1998 itu; hampir semua aspirasi hak muncul dalam gerak dan protes politik. Hampir semua elemen dan golongan masyarakat bicara mengenai perlunya negara memberikan perlindungan dan jaminan yang lebih adil: kaum minoritas etnis bicara soal diskriminasi dan pengalaman kekerasan yang menimpa mereka, mahasiswa dan kaum muda bicara soal kebebasan politik dan demokrasi, kaum buruh tampil dalam aksi-aksi kolektif menuntut kebebasan berserikat yang lebih luas. Selain itu pelbagai lapisan masyarakat sipil juga tampil bersama. Tanggal 21 Mei adalah titik artikulasi dari jaman hak di Indonesia.

Ketiga, tanggal 8 Desember. Mengapa 8 Desember? Karena pada tanggal 8 Desember 1965 Indonesia kedatangan Munir. Tanggal 8 Desember adalah hari lahir Munir Said Thalib. Pendiri KONTRAS, IMPARSIAL yang secara penuh keberanian mengatasi rasa takut menyuarakan kehidupan sipil yang kokoh. Perjuangan penuh keberanian MUNIR, tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, aktivitasnya memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pelbagai bidang reformasi politik di Indonesia: reformasi sektor keamanan, mekanisme perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja HAM, model advokasi hak asasi manusia untuk LSM-LSM hak asasi. Munir juga merupakan figure dari tokoh sipil menyuarakan hak sebagai gagasan universal melampaui segala rintangan etnis, agama dan gender.

Dan, Mulya adalah salah satu inspirasi dalam percaturan diskursus hak asasi manusia.

Selanjutnya, ada tiga pilihan sederhana untuk kita: 14 Juli, 21 Mei atau 8 Desember? Hari itu sudah berlalu dalam sejarah kita, namun daya reservasinya masih terus melindungi kita hingga hari ini. Memberikan satu hari untuk memperingatinya, akan memberikan kita jaminan yang lebih panjang untuk menangkal kemungkinan kembalinya orang-orang kejam dalam politik kita.